

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap individu yang menjalankan suatu badan usaha pastinya ingin memiliki tingkat kestabilan yang tinggi agar dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang dan terhindar dari kebangkrutan. Agar suatu bisnis dapat berjalan dengan lancar maka di perlukan hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan perusahaan (*stakeholder*) seperti pemilik bisnis, karyawan, konsumen, supplier, dan lain-lain.

Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia menyebabkan banyak perusahaan yang gagal mempertahankan perusahaannya, banyak owner yang memilih menutup perusahaannya dikarenakan sulit menyeimbangi dampak yang ditimbulkan atas terjadinya pandemi tersebut. Berdasarkan hasil survei Kementrian Ketenagakerjaan, menunjukkan umumnya terjadi kerugian yang dialami sekitar 88% perusahaan di indonesia yang terdampak dari pandemi Covid-19 selama 6 (enam) bulan terakhir. Kerugian itu terjadi karena penjualan perusahaan mengalami penurunan, sehingga proses produksi juga harus dikurangi (Kementrian Ketenagakerjaan, 2020).

Atas terjadinya pandemi ini, pemerintah meminta perusahaan untuk menerapkan sistem *work from home* (WFH), bahkan banyak perusahaan

yang memilih untuk mengurangi jumlah tenaga kerjanya. Perusahaan dalam sektor manufaktur akan sulit menangani hal ini dikarenakan perusahaan dalam sektor ini akan sulit menjalankan kegiatan operasionalnya, sebagaimana yang di ketahui bahwa perusahaan manufaktur memerlukan banyak sumber daya manusia (SDM) untuk membantu menjalankan proses produksi. Dengan dibatasinya kegiatan SDM dalam perusahaan selama masa pandemi ini banyak perusahaan manufaktur memilih untuk mengurangi tenaga kerjanya, sehingga target yang di harapkan perusahaan sulit tercapai, pendapatan perusahaan akan menurun dan sulit menutupi beban yang harus di keluarkan.

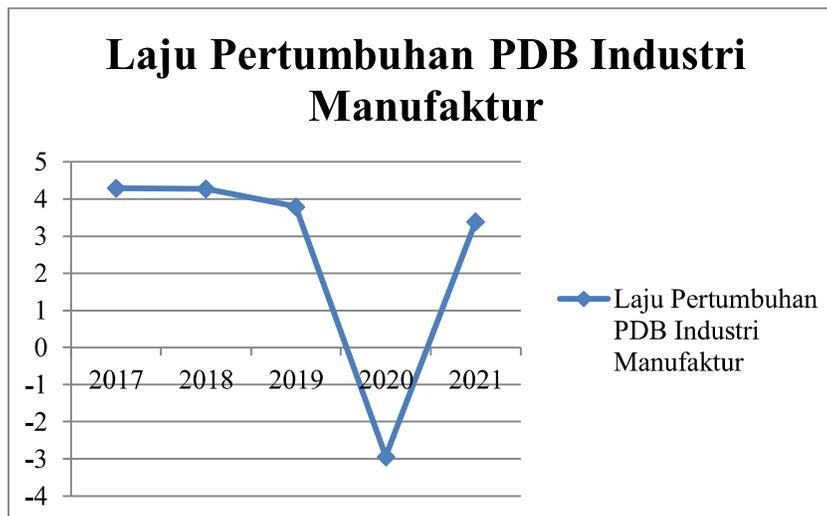
Berikut ini adalah data yang dikutip dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan laju pertumbuhan PDB industri manufaktur di Indonesia.

Tabel 1. 1 Laju Pertumbuhan PDB Industri Manufaktur

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Laju Pertumbuhan PDB Industri Manufaktur	4,29	4,27	3,80	-2,93	3,39

Sumber : <https://www.bps.go.id>

Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 dimana penurunan ini di sebabkan oleh dampak atas terjadinya Pandemi Covid-19 yang mulai masuk di Indonesia pada Maret 2020. Namun pada tahun 2021 laju pertumbuhan PDB industri manufaktur kembali meningkat. Berikut ini adalah laju pertumbuhan PDB industri manufaktur dalam grafik.



Gambar 1. 1 Grafik Laju Pertumbuhan PDB Industri Manufaktur

Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya tidak hanya diwajibkan untuk memperoleh keuntungan atau *profit*, namun juga diharuskan untuk memiliki tanggung jawab sosial. Perusahaan di minta untuk memperhatikan setiap lingkungan yang kemungkinan akan terkena imbas atas jalannya kegiatan perusahaan. Tanggung jawab ini di tujukan secara luas kepada masyarakat, lingkungan dan seluruh pemangku kepentingan atau *stakeholder*. Jika perusahaan sudah menerapkan tanggung jawabnya dengan baik maka akan menjamin kesejahteraan masyarakat dan citra perusahaan akan baik juga, dimana hal ini akan membuat merk dagang perusahaan menjadi kuat sehingga akan menarik perhatian para *shareholder* (investor). Al-Kholy (2009) dalam Ahmad, N., Mobarek, A., & Raid, M. (2023) menunjukkan perlunya tata kelola yang baik, CSR dan transparansi untuk mempromosikan integritas pasar keuangan.

Masyarakat sangat berpengaruh dalam penerapan CSR ini dikarenakan perusahaan yang didirikan dalam lingkungan masyarakat tentunya akan mengakibatkan kerusakan lingkungan, dengan diterapkannya CSR ini maka akan meminimalisir dan bahkan dapat memusnahkan risiko kerusakan tersebut. Selain itu, keberhasilan perusahaan juga dipengaruhi oleh masyarakat karena item yang akan ditawarkan perusahaan tentunya akan ditujukan terhadap kebutuhan masyarakat, jika perusahaan tidak mampu memberikan kepercayaan maka masyarakat akan menjadi ragu untuk menggunakan atau memakai produk dan jasa yang ditawarkan. Perusahaan yang telah memiliki eksistensi di mata publik akan lebih mudah berkembang dikarenakan masyarakat akan lebih percaya menggunakan produk dan jasa yang telah banyak direkomendasikan.

Peraturan pemerintah No. 47 tahun 2012 menyatakan bahwa “Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan wajib di muat dalam laporan tahunan perseroan untuk dipertanggungjawabkan kepada RUPS”. CSR merupakan hal yang wajib di laporkan secara tertulis dan harus disebarluaskan. Jika perusahaan tidak melaporkan CSR maka perusahaan tersebut akan di anggap tidak menaati peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan akan memberikan spekulasi buruk, seperti halnya perusahaan tidak melampirkan pelaksanaan CSR karena perusahaan tersebut tidak menjalankan tanggung jawab sosialnya dengan baik

sehingga akan memberikan dampak terhadap citra perusahaan yang buruk dan membuat perusahaan berada di ujung kegagalan.

Perusahaan juga perlu memperhatikan tata kelola perusahaannya atau dapat di kenal dengan istilah *Good Corporate Governance* (GCG). Perusahaan yang berhasil menerapkan GCG yang baik pastinya akan membuat kegiatan perusahaannya berjalan efektif dan efisien, dikarenakan tata kelola yang telah di terapkan membuat segala tugas dan tanggung jawab tidak menjadi tumpang tindih, semua tenaga kerja yang ada bergerak sesuai kewajiban dan wewenang masing-masing sehingga tujuan perusahaan akan terealisasi. Namun di butuhkan juga komunikasi dan kerjasama yang baik untuk mendukung tercapainya GCG yang baik tersebut. Tata kelola perusahaan dapat diukur melalui Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Komisaris, dan Ukuran Komite Audit.

Kepemilikan Institusional merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberlangsungan perusahaan. Para institusi atau lembaga yang memiliki saham suatu perusahaan akan dijamin kesejahteraannya dikarenakan adanya Kepemilikan Institusional ini akan mendorong pihak perusahaan untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap operasional perusahaannya. Semakin tinggi tingkat kepemilikan saham institusional maka akan semakin meningkat monitoring operasional perusahaan, dengan adanya monitoring ini maka segala kecurangan atau tindakan penyelewangan yang akan menyebabkan kerugian pada perusahaan akan lebih berisiko kecil.

Dalam sebuah perusahaan diperlukan Dewan Komisaris untuk mengendalikan internal perusahaan, dimana mereka secara bersama-sama memberikan arahan dan mengawasi pihak perusahaan dalam menjalankan GCG. Semakin banyaknya Dewan Komisaris maka monitor terhadap pelaksanaan GCG dapat lebih efektif. Dewan Komisaris bertugas untuk memberikan saran kepada pengelola perusahaan agar pengungkapan GCG dapat lebih berkualitas baik, sehingga dapat membantu hubungan yang baik juga antara pihak perusahaan dengan para pemangku kepentingan. Dalam menjalankan tugas sebagai Dewan Komisaris diperlukan Komite Audit yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dari Dewan Komisaris. Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu memastikan apakah sistem pengendalian internal perusahaan telah berjalan efektif atau belum dan sebagai penghubung antara Dewan Komisaris dengan auditor eksternal.

Pelaksanaan GCG diharapkan mampu meningkatkan pelaksanaan CSR. Masih banyak perusahaan yang belum mampu menerapkan CSR dan belum sadar atas pentingnya CSR bagi perusahaan, oleh karena itu diperlukan GCG yang baik untuk mendorong pihak manajemen perusahaan melaksanakan CSR. Penelitian yang dilakukan oleh Stefanny dkk. (2021:2868) menyatakan bahwa GCG yang di proksikan dengan jumlah Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Komite Audit berpengaruh namun tidak signifikan terhadap CSR, penelitian ini dilakukan pada 30 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2018. Penelitian

lain yang dilakukan oleh Putra, Akbar Dwi, Gatot Nazir A. dan Sholatia D. (2022:280) menyatakan bahwa GCG yang di proksikan dengan Ukuran Dewan Direksi berpengaruh signifikan terhadap CSR, penelitian ini dilakukan pada 82 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.

Banyak perusahaan yang menganggap bahwa pelaksanaan CSR tidak begitu penting. Hal ini dapat dilihat pada kasus PT Ultrajaya Milk Industry Tbk. (ULTJ) tahun 2017 dimana masyarakat Desa Gadobangkong melakukan unjuk rasa atas bau limbah dari pabrik ULTJ, bau limbah ini sudah terjadi sejak tahun 2010 dan semakin hari semakin menyengat hingga mengeluarkan bau tak sedap sampai membuat para masyarakat mengalami sesak nafas, mual-mual dan bahkan muntah. Masyarakat sudah melakukan protes, namun pihak perusahaan selalu mengingkari janjinya. Setelah adanya desakan dari warga dan diberikan peringatan tegas, perusahaan ULTJ pada Desember 2017 memaksimalkan pengolahan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) perusahaannya dengan memperbaiki peralatan yang rusak serta memasang peralatan baru sehingga pencemaran lingkungan tidak akan terjadi lagi. Apabila kedepannya terjadi pencemaran kembali maka ULTJ akan dikenakan sanksi sesuai uu yang berlaku.

Kasus lain yang terjadi adalah penggugatan yang dilakukan oleh warga Pulau Pari dimana terjadinya krisis iklim yang berdampak pada lingkungan, seperti naiknya permukaan air laut di sekitar pulau pari yang

mengakibatkan terjadinya peningkatan banjir, akibat banjir ini banyak rumah maupun jalan yang mengalami kerusakan. Warga menggugat PT Holcim ke pengadilan swiss karena di duga berkontribusi terhadap krisis iklim tersebut. PT Holcim di nilai sebagai salah satu perusahaan yang menyumbang emisi tertinggi secara global. Gugatan menuntun PT Holcim untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. PT Holcim tidak mau berkomentar segera atas gugatan ini. Mereka mengaku akan mengambil tindakan iklim dengan sangat serius dan telah secara signifikan mengurangi jejak karbon selama dekade terakhir. Warga meminta PT Holcim untuk menanam satu sampai dua juta pohon Mangrove untuk mengatasi dampak atas krisis iklim tersebut.

Berdasarkan pemaparan dan kasus-kasus yang terjadi, dapat dilihat bahwa masih banyak perusahaan yang tidak menerapkan tanggung jawab sosialnya dengan baik, padahal setiap entitas yang menjalankan usaha tentunya ingin usahanya terus berkembang dan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Untuk mendapatkan profit maksimal tersebut diperlukannya peran *customer* sebagai pengguna atas produk yang ditawarkan perusahaan, *customer* akan tertarik jika produk yang ditawarkan perusahaan memiliki eksistensi di khalayak publik, karna jika produk sudah banyak dikenal publik artinya produk tersebut dapat dipercaya. Untuk mendapatkan eksistensi dan kepercayaan dari khalayak publik perusahaan dapat meningkatkan penerapan program CSR, dimana jika perusahaan selalu berhasil menerapkan program CSR dan

mengutamakan kesejahteraan publik, maka publik akan semakin *familiar* dengan perusahaan tersebut sehingga mereka tidak akan ragu untuk menggunakan produk yang ditawarkan. Namun dalam keberhasilan penerapan program CSR sebagai elemen pengungkapan yang wajib di cantumkan dalam laporan keuangan perusahaan tersebut apakah mekanisme dalam GCG seperti Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Komisaris dan Ukuran Komite Audit ikut mempengaruhinya, maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian yang di beri judul : **ANALISIS MEKANISME *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*.**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang tertulis, maka permasalahan yang akan di identifikasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pelaksanaan CSR yang sering di anggap sepele dan tidak dilampirkan dalam laporan keuangan tahunan karena dianggap tidak penting.
2. Tata kelola perusahaan yang kurang baik berdampak pada rendahnya pengawasan yang dilakukan oleh manajerial.

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang tertulis, untuk memecahkan permasalahan yang terjadi maka peneliti membatasi masalah-masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Peneliti membatasi variabel indenpenden pada *Good Corporate Governance* (GCG) yang diproksikan hanya pada Kepemilikan Institusional (X1), Ukuran Dewan Komisaris (X2) dan Ukuran Komite Audit (X3).
2. Peneliti membatasi pengukuran variabel dependen pada *Corporate Social Responsibility* (CSR) hanya menggunakan standar terbaru yang di keluarkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI) yaitu G4 dengan 91 indikator pengukuran.
3. Peneliti membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR).
4. Penelitian hanya difokuskan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam periode tahun 2017-2021.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tertulis, maka masalah yang dapat di rumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah analisis Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan?
2. Apakah analisis Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan?
3. Apakah analisis Ukuran Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan?
4. Apakah analisis Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Komisaris dan Ukuran Komite Audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di paparkan, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
2. Untuk menganalisis Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
3. Untuk menganalisis Ukuran Komite Audit berpengaruh terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
4. Untuk menganalisis Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Komisaris dan Ukuran Komite Audit secara simultan berpengaruh terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

1.6. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah di paparkan, manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan digunakan sebagai bahan rujukan untuk pengembangan pengetahuan atau digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya mengenai mekanisme *Good Corporate Governance* yang di proksikan dengan Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Komisaris dan Ukuran Komite Audit terhadap *Corporate Social Responsibility*.

2. Manfaat Praktis

Secara praktisnya, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak, antara lain :

- a. Akademis, penelitian ini diharapkan dapat membantu sebagai referensi dalam perluasan pengetahuan mengenai mekanisme *Good Corporate Governance* yang di proksikan dengan Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Komisaris dan Ukuran Komite Audit terhadap *Corporate Social Responsibility*.
- b. Peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat membantu sebagai referensi atau rujukan dalam penelitian yang dilakukan mengenai mekanisme GCG (Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Komisaris dan Ukuran Komite Audit) dan CSR yang di proses menggunakan 91 Indikator GRI G4.

- c. Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau gambaran untuk dapat lebih memperhatikan tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosialnya.
- d. Investor, penelitian ini di harapkan dapat membantu sebagai bahan pertimbangan investor/calon investor sebelum menanamkan modalnya pada perusahaan guna mendapatkan keuntungan maksimal.